

# PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT 2014

## OUTLINE ANALISIS PROVINSI

1. Perkembangan Indikator Utama
  - 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
  - 1.2 Pengurangan Pengangguran
  - 1.3 Pengurangan Kemiskinan
2. Kinerja Pembangunan Kota/ Kabupaten
  - 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
  - 2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
  - 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
  - 2.4 Kesenjangan Wilayah
3. Penyebab Permasalahan Pembangunan
  - 3.1 Tingginya Ketergantungan terhadap Sektor Primer (Pertanian)
  - 3.2 Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
  - 3.3 Rendahnya Kualitas lapangan Kerja
  - 3.4 Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah
  - 3.5 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
  - 3.6 Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat
  - 3.7 Rendahnya Kualitas Belanja Daerah
4. Prospek Pembangunan Tahun 2015
5. Penutup
  - 5.1 Isu Strategis Daerah
  - 5.2 Rekomendasi Kebijakan



Desember 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH



# Perkembangan Pembangunan Provinsi Jawa Barat 2014

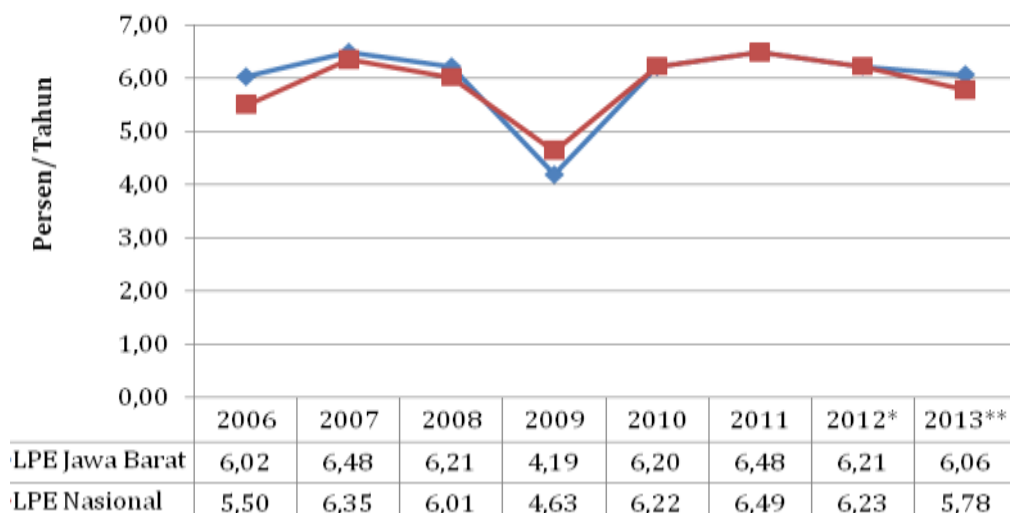
## SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

### A. Perkembangan Indikator Utama

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Selama periode 2006-2013 kinerja perekonomian di Provinsi Jawa Barat cukup baik, terlihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2000 yang tumbuh dengan laju rata-rata 5,97 persen per tahun. Pada periode yang sama, laju pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional (PDB Nasional) sebesar 5,90 persen per tahun, lebih rendah dari laju pertumbuhan di Jawa Barat (Gambar 1). Pertumbuhan PDRB Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan pencapaian rata-rata nasional. Dalam pembentukan output nasional, PDRB Provinsi Jawa Barat berkontribusi sebesar 14,07 persen pada tahun 2012. Dari perspektif wilayah, kontribusi Jawa Barat terhadap output wilayah Jawa sebesar 23,89 persen. Besarnya PDRB Provinsi Jawa Barat merupakan terbesar ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur.

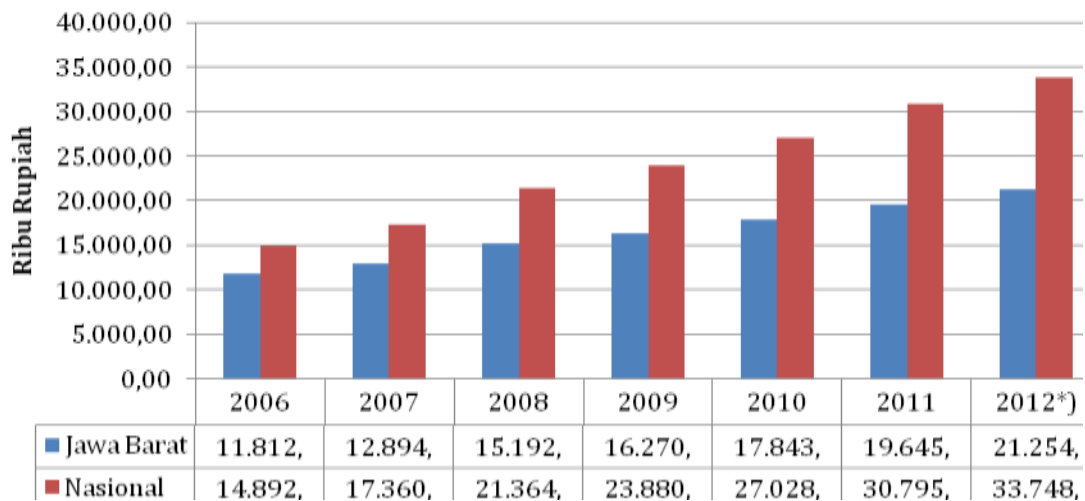
**Gambar 1**  
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000



Sumber: BPS, 2013

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat meningkat signifikan pada akhir tahun 2013, namun kinerja perekonomian secara keseluruhan tahun 2013 melambat apabila dibandingkan tahun 2012. Laju pertumbuhan ekonomi tersebut belum cukup untuk mengurangi kesenjangan pendapatan perkapita Jawa Barat dari angka rata-rata nasional.

**Gambar 2**  
**PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku**

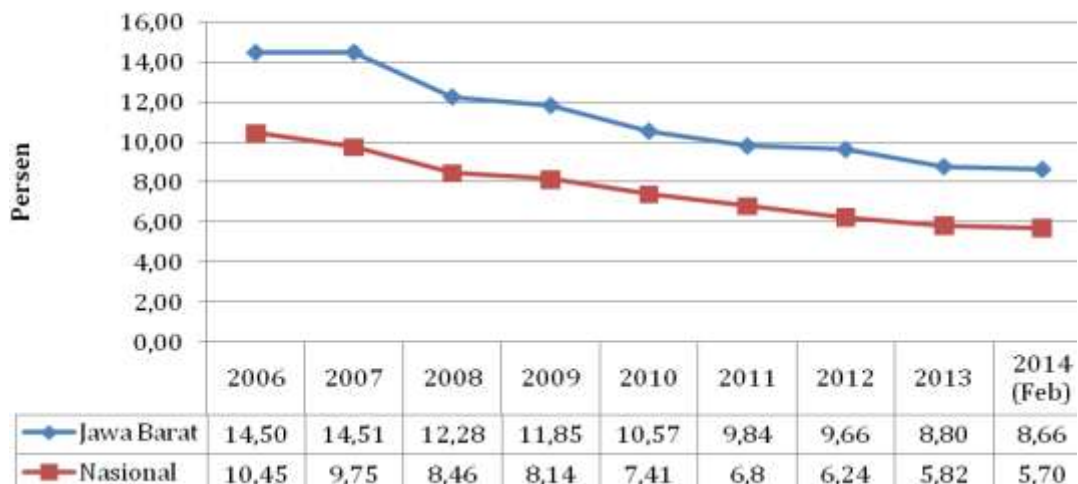


Sumber: BPS, 2013

## 2. Pengurangan Pengangguran

Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat cenderung menurun. Tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat berkurang sebesar 5,70 persen selama tahun 2006-2013, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi belum berhasil menekan tingkat pengangguran secara signifikan. Tingkat pengangguran Secara nasional, tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat lebih tinggi dari nasional (Gambar 3).

**Gambar 3**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka**



Sumber: BPS, 2014

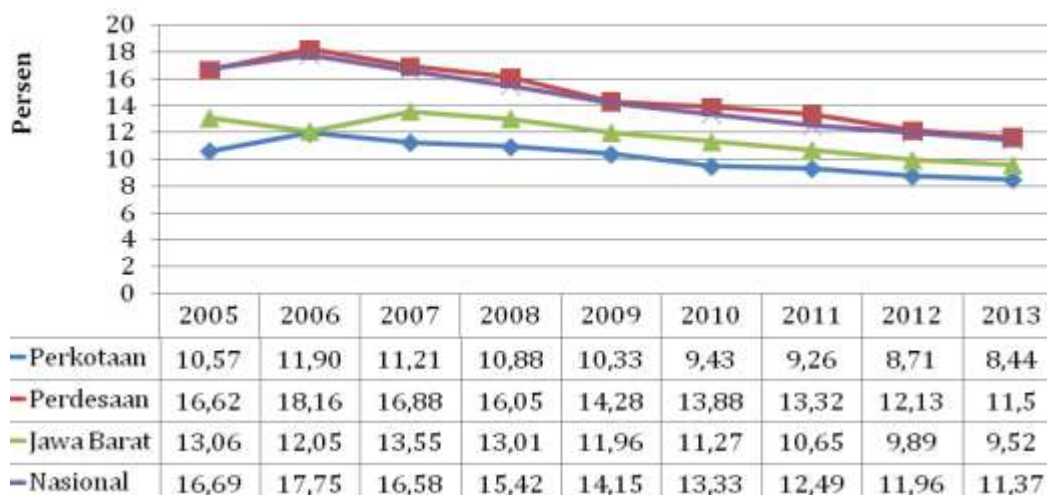
Tantangan yang harus dihadapi terkait tingginya tingkat pengangguran di Jawa Barat adalah mendorong pengembangan kegiatan dan sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi, seperti industri manufaktur, perdagangan, dan jasa. Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi untuk manufaktur termasuk diantaranya elektronik, industri kulit, pengolahan makanan, tekstil, furnitur dan industri pesawat. Selain

itu diperlukan pengembangan sektor usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sehingga mampu menyerap tenaga kerja secara informal.

### 3. Pengurangan Kemiskinan

Selama periode 2005-2013 persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat berfluktuasi dari 13,06 persen pada tahun 2005 dan mencapai 9,52 persen pada tahun 2013 (Gambar 4). Dalam kurun waktu tersebut tingkat kemiskinan penduduk Jawa Barat secara total lebih rendah dibandingkan nasional walaupun tingkat kemiskinan di perdesaan provinsi ini hampir sama dengan nasional. Tantangan yang harus dihadapi adalah lambatnya laju penurunan tingkat kemiskinan di provinsi ini, terutama di perdesaan. Tingginya persentase penduduk miskin di perdesaan menunjukkan kegiatan perekonomian yang stagnan, terutama sektor pertanian.

**Gambar 4**  
**Persentase Penduduk Miskin**



Sumber: BPS, 2014

## B. Kinerja Pembangunan Kabupaten/ Kota

Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja.

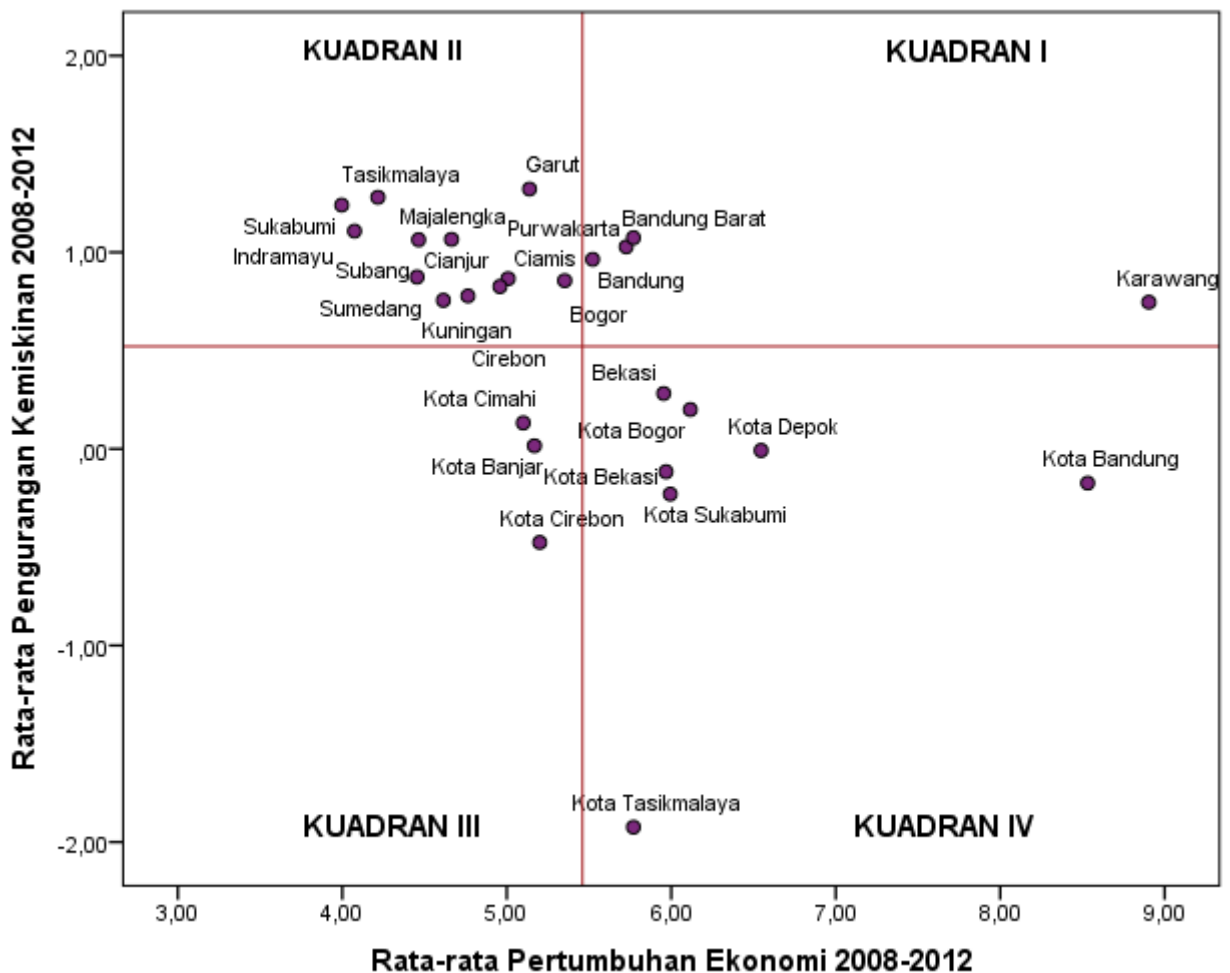
### 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 5 menunjukkan persebaran kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dengan penjelasan sebagai berikut. Pertama, Kabupaten Karawang, Bandung Barat, Bandung, dan Purwakarta terletak di kuadran I, merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kelima kabupaten tersebut dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-*

poor). Pemerintah sebaiknya mempertahankan pertumbuhan ekonomi serta tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan.

Kedua, Kabupaten Garut, tasikmalaya, Sukabumi, Indramayu, Subang, Sumedang, Kuningan, Cianjur, Majalengka, Cirebon, dan Ciamis terletak di kuadran II, merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi namun pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi Jawa Barat (*low-growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti kelautan, perikanan, pertanian, serta perdagangan dan jasa.

**Gambar 5**  
**Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin**  
**Tahun 2008-2012**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Ketiga, Kota Cimahi, Kota Banjar, dan Kota Cirebon terletak di kuadran III, merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). Pemerintah daerah harus bekerja

keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor dan kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja besar terutama dari golongan miskin. Pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

Keempat, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, dan Kota Bandung terletak di kuadran IV, merupakan kota dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata, dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*high-growth, less pro-poor*). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberikan dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu diperlukan juga program dan kebijakan dalam hal penanggulangan kemiskinan.

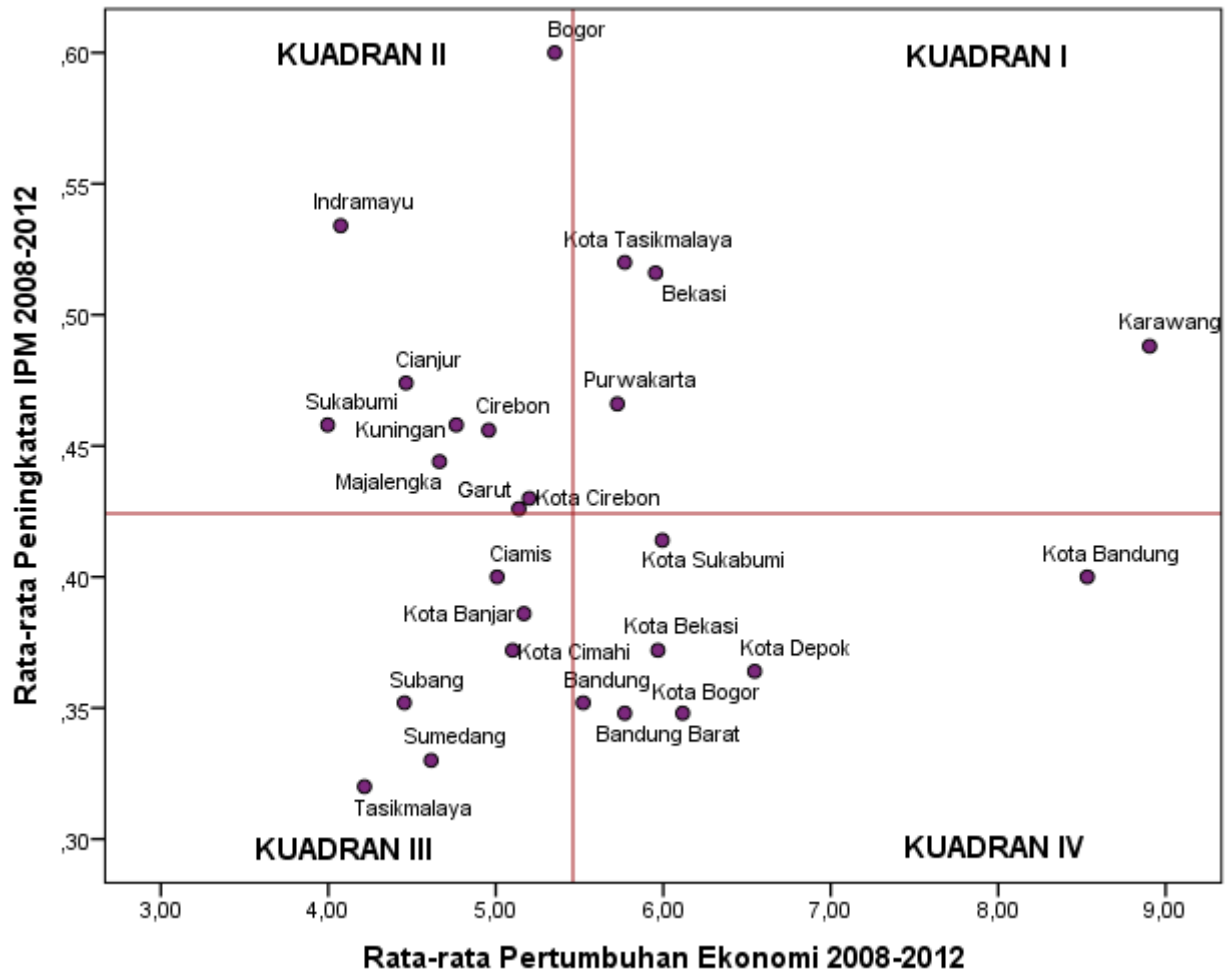
## 2. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

Gambar 6 menunjukkan distribusi kabupaten dan kota di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2012. Pertama, Kabupaten Karawang, Bekasi, Purwakarta, dan Kota Tasikmalaya terletak di kuadran I, merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Dalam kondisi ini tersirat bahwa pertumbuhan ekonomi telah sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Tantangan yang dihadapi pemerintah dalam kinerja yang baik ini adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kedua, Kabupaten Bogor, Indramayu, Cianjur, Sukabumi, Kuningan, Majalengka, Garut, Cirebon, dan Kota Cirebon terletak di kuadran II, termasuk daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi namun peningkatan IPM di atas rata-rata (*low-growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti industri manufaktur, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, dan kelautan.

Ketiga, Kabupaten Ciamis, Subang, Sumedang, Tasikmalaya, Kota Banjar, dan Kota Cimahi terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

**Gambar 6**  
**Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM Tahun 2008-2012**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Keempat, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Depok, dan Kota Bogor, Kota Sukabumi, dan Kota Bogor berada di kuadran IV, termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

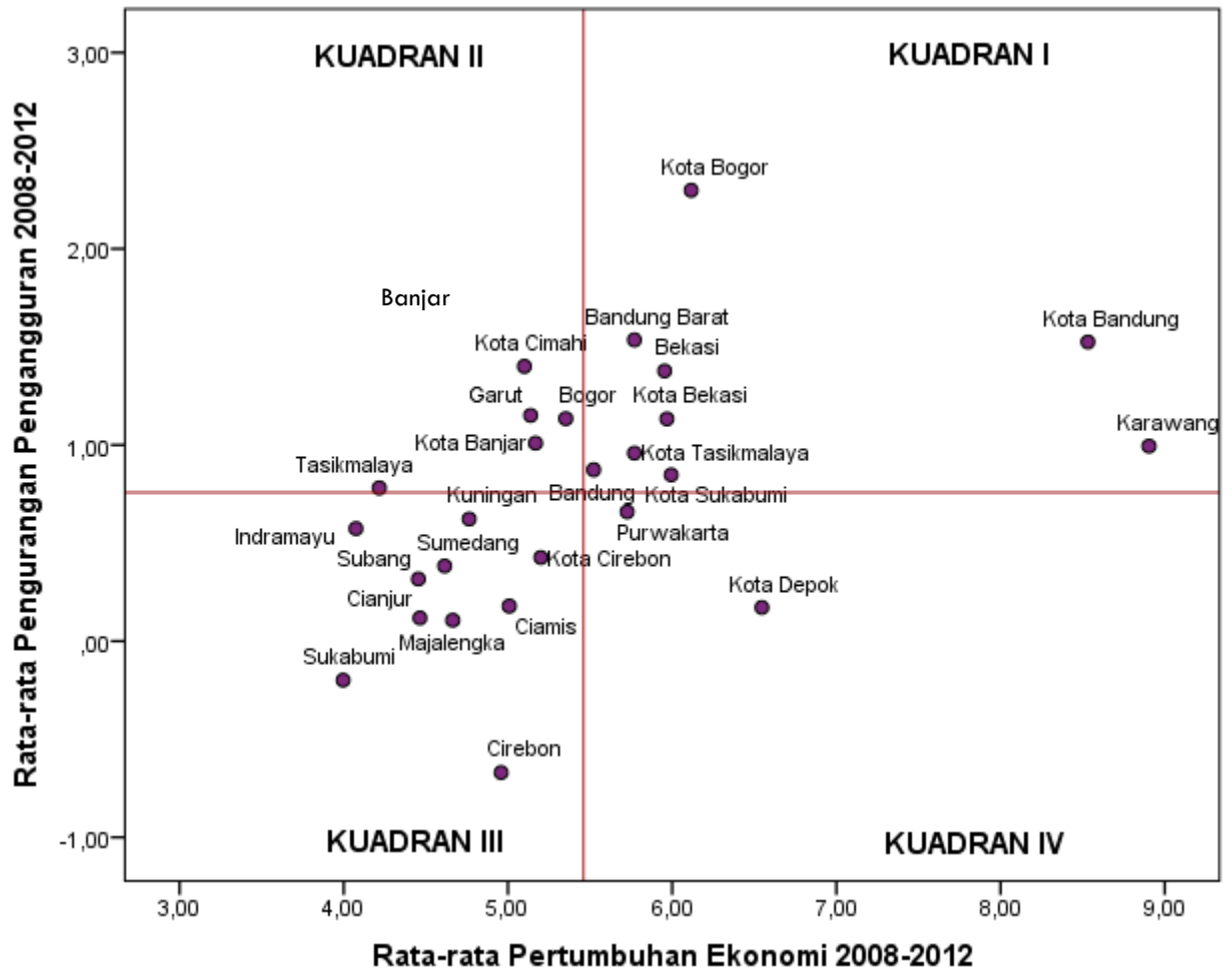
### 3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

Gambar 7 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012. Pertama, Kabupaten Karawang, Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Sukabumi terletak di kuadran I merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Dalam kondisi ini pertumbuhan ekonomi mampu mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi



oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti industri manufaktur, perdagangan dan jasa.

**Gambar 7**  
**Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Rata-Rata Pengurangan Jumlah Pengangguran Tahun 2008-2012**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

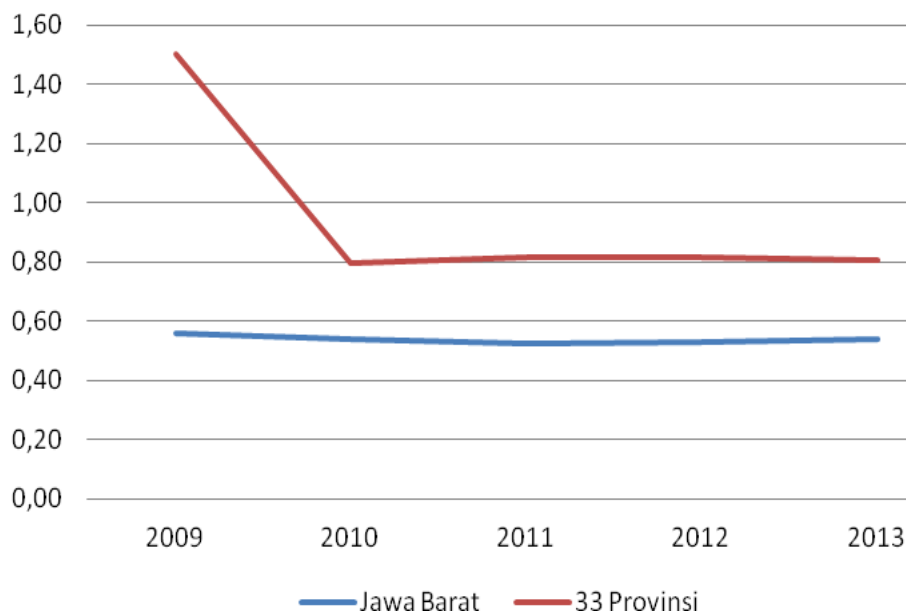
Kedua, Kabupaten Tasikmalaya, Garut, Bogor, Kota Cimahi, dan Kota Banjar terletak di kuadran II, merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi namun pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi (*low growth, pro-job*). Kinerja ini menunjukkan perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah. Ketiga, Kabupaten Indramayu, Sumedang, Subang, Kuningan, Cianjur, Majalengka, Sukabumi, Ciamis, Cirebon, dan Kota Cirebon terletak di kuadran III, termasuk daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less-pro job*). Pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

Keempat, Kabupaten Purwakarta dan Kota Depok terletak di kuadran IV, merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata namun memiliki pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*high-growth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti sektor industri manufaktur, perdagangan dan jasa. Selain itu diperlukan upaya mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang menyerap tenaga kerja di sektor informal.

#### 4. Kesenjangan Ekonomi

Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang ditunjukkan dengan nilai indeks wiliamson dari tahun 2007-2012 cukup tinggi. Kesenjangan ekonomi di Provinsi Jawa Barat masih berada di bawah nasional dengan kecenderungan semakin meningkat. Penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi di Jawa Barat adalah adanya aliran investasi dari daerah relatif miskin ke daerah relatif kaya. Hal ini dikarenakan investasi di daerah kaya akan lebih terjamin dan memberikan keuntungan yang besar. Keberadaan infrastruktur dasar masyarakat, pemberian bantuan modal, serta penguatan kelembagaan masyarakat perdesaan dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi.

**Gambar 8**  
**Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson)**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013**



Kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat cukup tinggi, terlihat dari besarnya gap antara kabupaten dan kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah. Kabupaten Bekasi memiliki rata-rata nilai PDRB per kapita

tertinggi dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain di Provinsi Jawa Barat periode 2007-2012.

**Tabel 1**  
**Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2007-2012 (000/jiwa)**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011*</b>	<b>2012**</b>
Bogor	11.731	12.959	14.232	15.384	17.093	19.220
Sukabumi	6.441	7.038	7.448	7.912	8.459	8.974
Cianjur	6.547	7.275	7.778	8.460	9.308	9.981
Bandung	11.257	12.619	13.273	14.431	15.852	17.256
Garut	7.699	3.715	9.391	10.292	11.234	1.150
Tasikmalaya	5.760	6.376	7.177	7.594	8.167	8.830
Ciamis	8.323	9.529	10.370	11.430	12.400	13.552
Kuningan	5.956	6.858	7.926	8.790	9.504	10.441
Cirebon	6.362	7.613	8.324	9.243	9.971	10.841
Majalengka	6.270	7.153	7.730	8.681	9.259	10.065
Sumedang	8.537	9.622	10.334	11.173	12.155	13.267
Indramayu	20.981	25.125	25.296	27.809	31.321	34.177
Subang	8.491	9.398	10.159	10.810	11.479	12.394
Purwakarta	13.979	16.070	16.892	18.635	20.160	21.782
Karawang	17.824	20.589	23.035	27.559	31.006	32.434
Bekasi	32.289	34.376	35.542	36.835	39.876	41.796
Bandung Barat	8.639	9.936	10.671	11.566	12.589	13.784
Kota Bogor	9.624	11.089	12.789	14.566	16.009	17.544
Kota Sukabumi	11.131	12.764	14.928	17.256	19.474	21.581
Kota Bandung	21.769	25.749	29.626	34.114	39.220	45.136
Kota Cirebon	26.482	30.578	33.551	36.752	40.161	43.653
Kota Bekasi	11.995	13.474	13.894	15.196	17.052	18.730
Kota Depok	6.877	7.807	8.400	9.228	10.122	10.894
Kota Cimahi	18.196	20.549	21.973	23.631	25.712	27.724
Kota Tasikmalaya	10.303	11.474	12.340	13.278	14.338	15.544
Kota Banjar	7.591	8.347	9.179	10.046	10.929	11.868
<b>JAWA BARAT</b>	<b>12.895</b>	<b>15.235</b>	<b>16.271</b>	<b>17.843</b>	<b>19.645</b>	<b>21.255</b>

Sumber: BPS, 2012

## C. Penyebab Permasalahan Pembangunan

### 1. Ketergantungan tinggi pada sektor pertanian

Industri pengolahan memberikan sumbangan terbesar dalam pembentukan total PDRB Jawa Barat, sementara itu peranan sektor-sektor yang mendukung industrialisasi sangat rendah. Struktur perekonomian Jawa Barat didominasi industri pengolahan (34,56 persen), perdagangan (24,44 persen), dan pertanian (11,95 persen). Sektor pendukung industrialisasi meliputi sektor angkutan dan telekomunikasi menyumbang sebesar 8,20 persen, dan sektor listrik, gas, dan air minum (utilitas) menyumbang 2,73 persen (Tabel 2). Sektor perdagangan memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap pembentukan nilai

PDRB wilayah dan juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, yaitu sekitar 26,18 persen. Penyerap tenaga kerja terbesar selanjutnya adalah sektor industri pengolahan sebesar 20,61 persen, dan sektor pertanian sebesar 19,80 persen dari jumlah penduduk yang bekerja.

**Tabel 2**  
**Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha (2013)**

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	<b>Pertanian</b>	<b>11.95</b>	<b>7.44</b>
2.	Pertambangan	1.74	1.12
3.	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>34.56</b>	<b>27.09</b>
4.	Listrik, Gas, Air Minum	2.73	1.49
5.	Konstruksi	4.40	2.85
6.	<b>Perdagangan, Hotel, Restoran</b>	<b>24.44</b>	<b>15.67</b>
7.	Angkutan, Telekomunikasi	8.20	37.24
8.	Keuangan	3.01	2.46
9.	Jasa-jasa	8.98	4.63
		100.00	100.00

Sumber: BPS, 2013

Apabila ditelusuri lebih lanjut, sektor basis di Provinsi Jawa Barat meliputi industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih, dan perdagangan. Sektor industri pengolahan memiliki nilai *Location Quotient* lebih besar dari satu ( $LQ > 1$ ) terutama untuk industri pengolahan bukan migas (Tabel 3). Sektor industri pengolahan yang meliputi subsektor industri non-migas meliputi tekstil, barang kulit dan alas kaki, pupuk, kimia dan barang dari karet, alat angkutan mesin dan peralatan, dan barang lainnya. Sektor listrik, gas, dan air bersih merupakan sektor dengan nilai LQ tertinggi selama tahun 2008-2012. Sektor perdagangan yang semakin berkembang di Jawa Barat juga didukung fasilitas yang relatif baik, dan meningkatnya volume perdagangan seiring dengan jumlah penduduk yang semakin banyak.

**Tabel 3**  
**Nilai LQ Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2012**

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
<b>1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan</b>	0,93	1,01	0,99	0,96	0,92
a. Tanaman Bahan Makanan	1,39	1,52	1,51	1,48	1,41
b. Tanaman Perkebunan	0,33	0,36	0,33	0,33	0,32
c. Peternakan	1,08	1,07	1,04	0,99	0,96
d. Kehutanan	0,18	0,15	0,16	0,15	0,15
e. Perikanan	0,28	0,31	0,30	0,29	0,29
<b>2. Pertambangan dan Pengalihan</b>	0,28	0,30	0,29	0,27	0,24
a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,47	0,51	0,51	0,49	0,46
b. Pertambangan Bukan Migas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
c. Pengalihan	0,16	0,16	0,14	0,14	0,14
<b>3. Industri Pengolahan</b>	1,71	1,66	1,63	1,63	1,61

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
a. Industri Migas	0,33	0,35	0,33	0,34	0,35
1). Pengilangan Minyak Bumi	0,75	0,77	0,73	0,74	0,75
2). Gas Alam Cair (LNG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Bukan Migas	1,84	1,77	1,74	1,74	1,70
<b>4. Listrik, Gas &amp; Air Bersih</b>	<b>2,85</b>	<b>2,87</b>	<b>2,91</b>	<b>2,82</b>	<b>2,87</b>
a. Listrik	3,68	3,73	3,86	3,65	3,65
b. Gas	1,33	1,59	1,44	1,39	1,44
c. Air Bersih	1,34	1,33	1,38	1,41	1,46
<b>5. Konstruksi</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>	<b>0,57</b>	<b>0,61</b>	<b>0,64</b>
<b>6. Perdagangan, Hotel &amp; Restoran</b>	<b>1,12</b>	<b>1,22</b>	<b>1,26</b>	<b>1,24</b>	<b>1,28</b>
a. Perdagangan Besar dan Eceran	1,17	1,31	1,33	1,31	1,35
b. Hotel	0,64	0,67	0,75	0,61	0,57
c. Restoran	0,95	0,90	0,94	0,99	1,04
<b>7. Pengangkutan dan Komunikasi</b>	<b>0,53</b>	<b>0,49</b>	<b>0,51</b>	<b>0,53</b>	<b>0,54</b>
a. Pengangkutan	0,74	0,75	0,78	0,79	0,84
1). Angkutan Rel	2,19	1,98	2,25	2,47	2,46
2). Angkutan Jalan Raya	1,39	1,43	1,42	1,51	1,52
3). Angkutan Laut	0,08	0,05	0,06	0,05	0,05
4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5). Angkutan Udara	0,33	0,33	0,46	0,35	0,56
6). Jasa Penunjang Angkutan	0,22	0,21	0,23	0,26	0,26
b. Komunikasi	0,35	0,31	0,33	0,36	0,36
<b>8. Keuangan, Real Estate &amp; Jasa Perusahaan</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>	<b>0,34</b>	<b>0,36</b>	<b>0,38</b>
a. Bank	0,26	0,27	0,29	0,31	0,33
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0,51	0,49	0,47	0,48	0,48
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Real Estat	0,42	0,41	0,44	0,46	0,47
e. Jasa Perusahaan	0,26	0,26	0,27	0,28	0,29
<b>9. Jasa-jasa</b>	<b>0,72</b>	<b>0,70</b>	<b>0,72</b>	<b>0,73</b>	<b>0,75</b>
a. Pemerintahan Umum	0,88	0,86	0,83	0,79	0,78
b. Swasta	0,60	0,59	0,64	0,68	0,73
1). Jasa Sosial Kemasyarakatan	0,41	0,39	0,41	0,42	0,43
2). Jasa Hiburan dan Rekreasi	0,22	0,22	0,24	0,25	0,26
3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga	0,72	0,71	0,78	0,83	0,89

Nilai LQ dihitung menggunakan PDRB ADHK Tahun 2000

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Beberapa indikator di atas menekankan pentingnya pengembangan sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat. Ada dua alasan yang mendukung hal tersebut. Pertama, sektor pertanian primer memiliki elastisitas permintaan yang rendah terhadap pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan relatif bertahannya kinerja pertumbuhan sektor pertanian di masa krisis, namun ketika situasi ekonomi membaik dan pendapatan masyarakat meningkat permintaan terhadap komoditas pertanian tidak meningkat dengan proporsi yang sama. Berbeda halnya dengan permintaan terhadap produk manufaktur, yang sangat

elastis terhadap peningkatan pendapatan. Kedua, sektor industri pengolahan sangat potensial dalam menciptakan nilai tambah, mendorong perkembangan sektor-sektor lain (*multiplier effect*), dan menciptakan lapangan kerja.

Selama periode 2010-2014 sektor industri pengolahan, perdagangan, dan bangunan mampu menciptakan lapangan pekerjaan secara signifikan. Selama tahun 2010 sampai dengan awal tahun 2014 sektor industri pengolahan menyerap tenaga kerja lebih besar dibandingkan sektor lainnya (Tabel 4). Sektor ini ke depannya masih perlu berkembang lagi sehingga mampu menyerap angkatan kerja baru dan menyerap tenaga kerja semakin banyak.

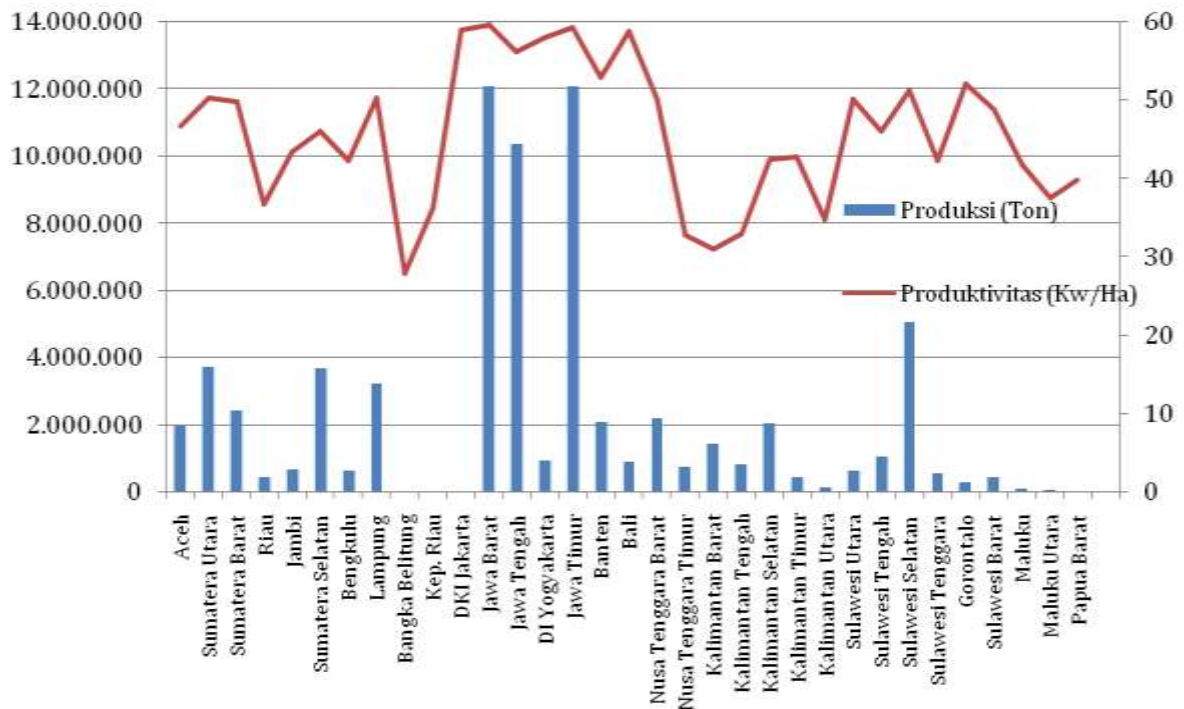
**Tabel 4**  
**Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 2010-2014**

No.	Lapangan Pekerjaan	2010	2014 (Feb)	Perubahan
1	Pertanian	4.275.654	3.849.676	-425.978
2	Pertambangan	100.944	120.988	20.044
3	Industri Pengolahan	3.111.149	4.007.278	896.129
4	Listrik, Gas, Air	37.976	72.437	34.461
5	Bangunan	937.956	1.569.935	631.979
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	4.316.799	5.091.227	774.428
7	Angkutan & Telekomunikasi	1.343.752	1.095.179	-248.573
8	Keuangan	268.384	619.194	350.810
9	Jasa-Jasa	2.790.193	3.017.869	227.676
	Total	17.182.807	19.443.783	2.260.976

Sumber: BPS, 2014

Provinsi Jawa Barat merupakan lumbung pangan bagi perekonomian wilayah dan nasional (Gambar 9). Surplus produksi padi di provinsi ini berpotensi mendukung ketahanan wilayah. Secara Nasional Jawa Barat merupakan penghasil padi terbesar dengan produksi mencapai 12,08 juta ton padi kering giling pada tahun 2013. Dengan asumsi faktor konversi padi ke beras sebesar 62,74 persen, dan tingkat konsumsi beras per kapita 139,15 kg per tahun, maka Jawa Barat berpotensi memiliki surplus beras sebesar 1,27 juta ton. Angka ini cukup signifikan untuk mendukung target surplus beras nasional sebesar 10 juta ton beras per tahun. Sejalan dengan produksi yang tinggi, tingkat produktivitas padi di Jawa Barat adalah yang tertinggi kedua setelah Jawa Timur secara nasional, dengan tingkat produktivitas sebesar 59,53 kwintal per hektar. Mengingat peran pentingnya, lahan pertanian pangan di Jawa Barat perlu dipertahankan dengan mengendalikan konversi lahan pertanian pangan.

**Gambar 9**  
**Produksi dan Produktivitas Padi Menurut Provinsi 2013**



Sumber: BPS, 2013

## 2. Kurangnya sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Dari sisi pengeluaran (penggunaan) pendorong utama pertumbuhan ekonomi Jawa Barat selama 2006-2013 pada konsumsi rumah tangga, ekspor, impor. Peranan konsumsi rumah tangga sangat besar dengan pangsa pasar 57,86 persen (Tabel 5). Tingginya laju pertumbuhan komponen ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi selanjutnya. Untuk pangsa pasar investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) yang penting bagi pertumbuhan daerah sebesar 18,34 persen. Investasi berperan meningkatkan stok kapital di daerah yang digunakan untuk memproduksi. Tingkat investasi yang rendah akan diikuti oleh terbatasnya kemampuan daerah untuk memacu peningkatan produksi. Meskipun konsumsi rumah tangga masih tetap merupakan sumber utama pertumbuhan daerah, Sumber pertumbuhan penting berikutnya adalah ekspor. Ekspor bertumbuh lebih tinggi dari laju PDRB dan kontribusinya dalam pembentukan output juga besar. Namun demikian pertumbuhan ekspor ini juga diiringi dengan pertumbuhan impor daerah yang kecil sehingga secara bersih (*net export*) perannya dalam pertumbuhan daerah relatif besar.

**Tabel 5**  
**PDRB Menurut Penggunaan 2013**

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Konsumsi Rumah Tangga	57,86	58,75
2.	Konsumsi Lembaga Nirlaba	0,46	0,59
3.	Konsumsi Pemerintah	8,95	5,32
4.	PMTB	18,34	17,73
5.	Perubahan Stok	4,91	4,00
6.	Ekspor	35,34	43,44
7.	Impor	25,86	29,82
	Total	100,00	100,00

*Sumber : BPS, 2013*

Sumber pertumbuhan selanjutnya adalah investasi. Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu ditingkatkan adalah iklim usaha di daerah. Iklim usaha yang kondusif bagi investasi terbentuk dari kualitas regulasi yang konsisten, perpajakan yang transparan dan tidak tumpang tindih, pelayanan perijinan yang efisien, dan kelembagaan penyelesaian konflik yang efektif. Langkah penting dalam perbaikan pelayanan perijinan adalah pelaksanaan dan penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara sungguh-sungguh dan konsisten. Dalam hal ini, semua kabupaten/kota di Jawa Barat secara formal telah memiliki badan/kantor yang menyelenggarakan PTSP. Ukuran keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut adalah peningkatan efisiensi perijinan yang harus tercermin dari menurunnya biaya dan waktu yang diperlukan oleh para pelaku usaha.

Tingginya persentase ekspor dan impor di Jawa Barat dikarenakan banyaknya kegiatan industri pengolahan di provinsi ini. Pertumbuhan yang terlalu bertumpu pada ekspor sangat rentan terhadap gejolak ekonomi dunia. Sementara itu, pertumbuhan yang terlalu bertumpu pada konsumsi masyarakat memiliki batas dan tidak berkelanjutan. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong terciptanya keseimbangan sumber-sumber pertumbuhan khususnya dengan meningkatkan peran investasi (pembentukan modal tetap bruto) dalam perekonomian daerah. Kegiatan investasi bertujuan meningkatkan produksi, penyempurnaan struktur industri, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pemerataan pendapatan.

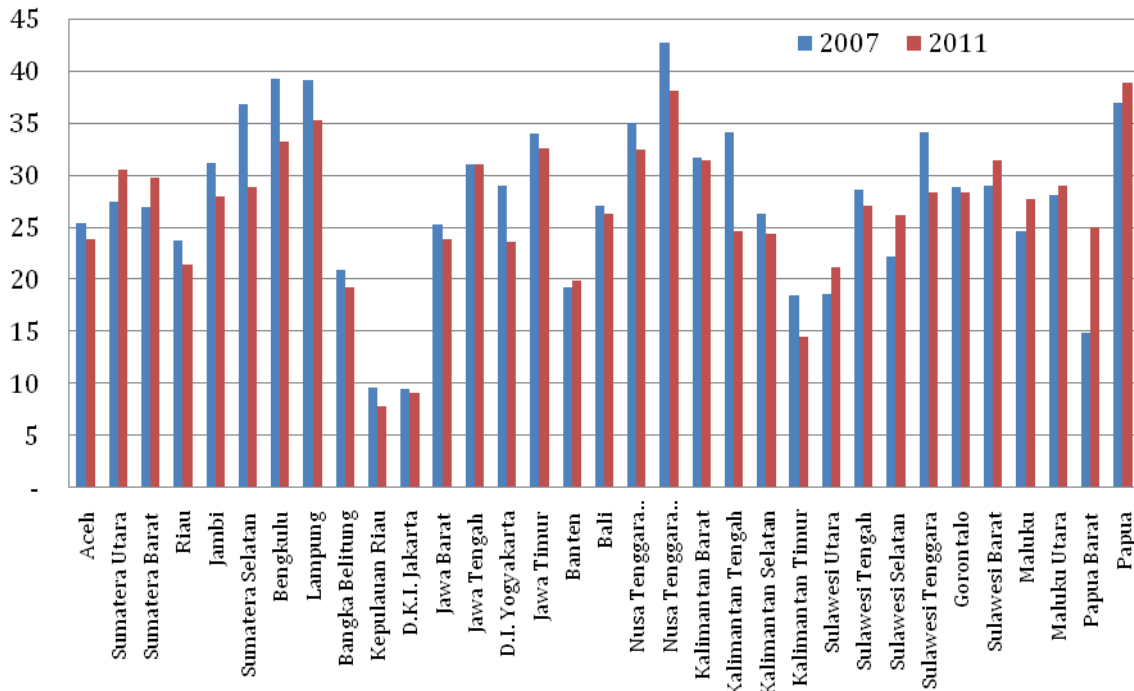
### **3. Rendahnya Kualitas lapangan Kerja**

Kualitas lapangan kerja yang tercipta selama kurun waktu 2007-2011 di Jawa Barat relatif menurun. Salah satu penyebab rendahnya PDRB perkapita dan masih tingginya kemiskinan daerah adalah rendahnya kualitas lapangan kerja yang tersedia. Tenaga kerja yang bekerja di sektor informal dimungkinkan mengalami peningkatan, baik yang bekerja sendiri maupun dibantu dengan anggota keluarga. Ini bisa dilihat dari banyaknya jumlah pekerja bebas di sektor pertanian, pekerja bebas di sektor non-pertanian, dan pekerja tidak dibayar. Pekerja bebas ini terhitung bekerja namun menghadapi ketidakpastian yang tinggi sehingga sangat rentan terhadap sedikit guncangan ekonomi yang terjadi.



Perkembangan tingkat pekerja yang kurang berkualitas di Jawa Barat persentasenya menurun dari tahun 2007 ke 2011, yaitu dari sebesar 25,3 persen pada tahun 2007 menjadi sebesar 23,9 persen pada tahun 2011. Persentase ini masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 27,60 persen pada tahun 2011. Dibandingkan wilayah lainnya di Jawa, jumlah pengangguran kurang berkualitas di Jawa Barat menempati posisi ketiga tertinggi setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah.

**Gambar 10**  
**Persentase Pekerjaan Kurang Berkualitas**



Sumber: BPS, 2012

Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas lapangan kerja adalah dengan memperluas kesempatan kerja formal, memperlancar perpindahan pekerja dari pekerjaan yang produktivitasnya rendah ke pekerjaan yang produktivitasnya tinggi, dan mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja yang masih berada di sektor informal dan mempersempit kesenjangan upah pada tingkat produktivitas yang sama.

#### 4. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah. Pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan sarana transportasi dan ketersediaan jaringan listrik yang memadai. Ketersediaan jaringan jalan di Provinsi Jawa Barat diukur dari kerapatan jalan tergolong baik dan relatif lebih baik dari rata-rata nasional (Tabel 6). Jawa Barat dilayani oleh jaringan jalan sepanjang 25.500 km.

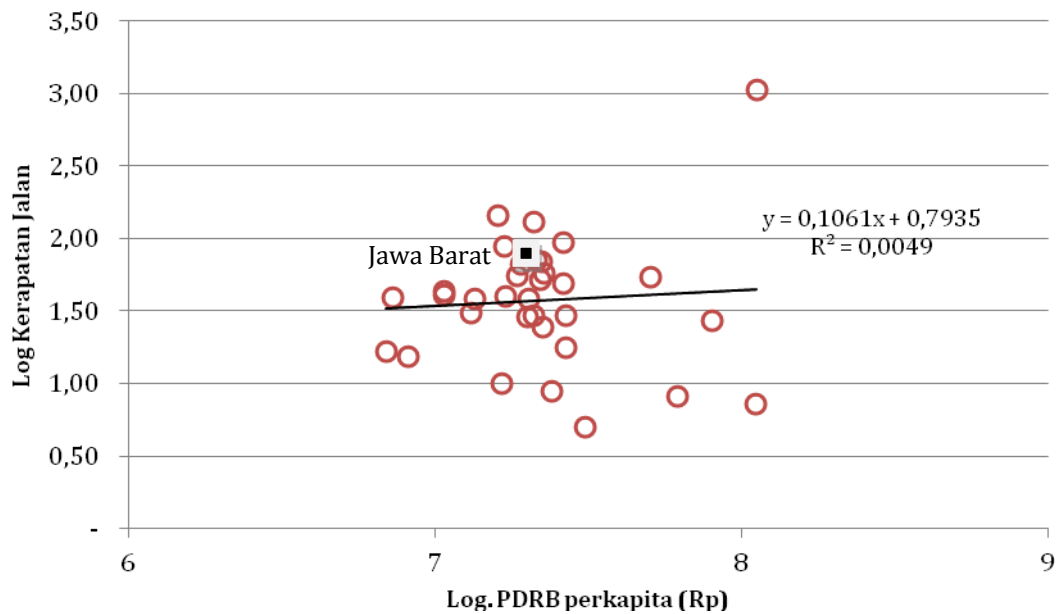
**Tabel 6**  
**Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2012**

No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
1	DKI Jakarta	111.913	1.068,36
2	DIY	16.054	146,56
3	Bali	20.948	130,28
4	Jawa Timur	26.274	95,37
5	Jawa Tengah	16.864	88,75
<b>6</b>	<b>Jawa Barat</b>	<b>21.274</b>	<b>72,08</b>
7	Sulawesi Selatan	22.151	69,68
8	Banten	19.038	66,81
9	Sulawesi Utara	22.624	57,89
10	Lampung	18.460	56,44
11	Kep. Riau	50.174	54,95
12	Sumatera Barat	22.035	52,36
13	Sumatera Utara	26.185	49,50
14	NTB	10.691	43,55
15	Gorontalo	10.703	40,85
16	Sulawesi Barat	17.012	40,62
17	NTT	7.236	39,95
18	Bengkulu	13.522	38,99
19	Aceh	20.164	38,76
20	Sulawesi Tenggara	13.112	30,71
21	Kep. Bangka Belitung	26.784	29,93
22	Sulawesi Tengah	21.052	29,73
23	Kalimantan Selatan	20.051	29,28
24	Riau	79.786	27,25
25	Jambi	22.508	24,81
26	Sumatera Selatan	26.742	17,86
27	Maluku Utara	6.929	16,72
28	Maluku	8.134	15,39
19	Kalimantan Barat	16.421	10,00
30	Kalimantan Tengah	23.987	8,96
31	Papua Barat	61.462	8,24
32	Kalimantan Timur	111.210	7,22
33	Papua	30.713	5,06
	<b>Indonesia</b>	<b>33.531</b>	<b>25,99</b>

Sumber: BPS (2012), Statistik Kementerian PU (2013)

Dengan memperhatikan pola hubungan antara pendapatan per kapita dan kerapatan jalan wilayah untuk 33 provinsi di Indonesia, posisi Jawa Barat menunjukkan adanya hubungan yang positif antara PDB per kapita dan tingkat kerapatan jalan (Gambar 11). Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita semakin tinggi diikuti dengan semakin tingginya kerapatan jalan. Provinsi yang posisinya terletak di bawah kurva linier berarti mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Dengan kata lain, panjang jalan kurang dari yang seharusnya dimiliki suatu provinsi sesuai dengan tingkat pendapatannya. Posisi Jawa Barat dalam diagram ini berada di atas kurva linier. Hal ini berarti bahwa secara kuantitas kerapatan jalan di DKI Jakarta di atas rata-rata tingkat kerapatan jalan provinsi-provinsi dengan tingkat pendapatan yang sama.

**Gambar 11**  
**Hubungan antara Kerapatan Jalan dan GDP Per Kapita Tahun 2012**



Sumber: BPS (2013), Statistik Kementerian PU (2013)-diolah

Dari seluruh jalan yang ada di Provinsi Jawa Barat, 81 persen jalan nasional dalam kondisi baik, namun kondisi jalan provinsi dan kabupaten, masing-masing hanya 51 persen dan 38 persen yang berada dalam kondisi baik. Tingginya tingkat kerusakan jalan ini tentu menjadi penghambat peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi pengembangan industri lokal.

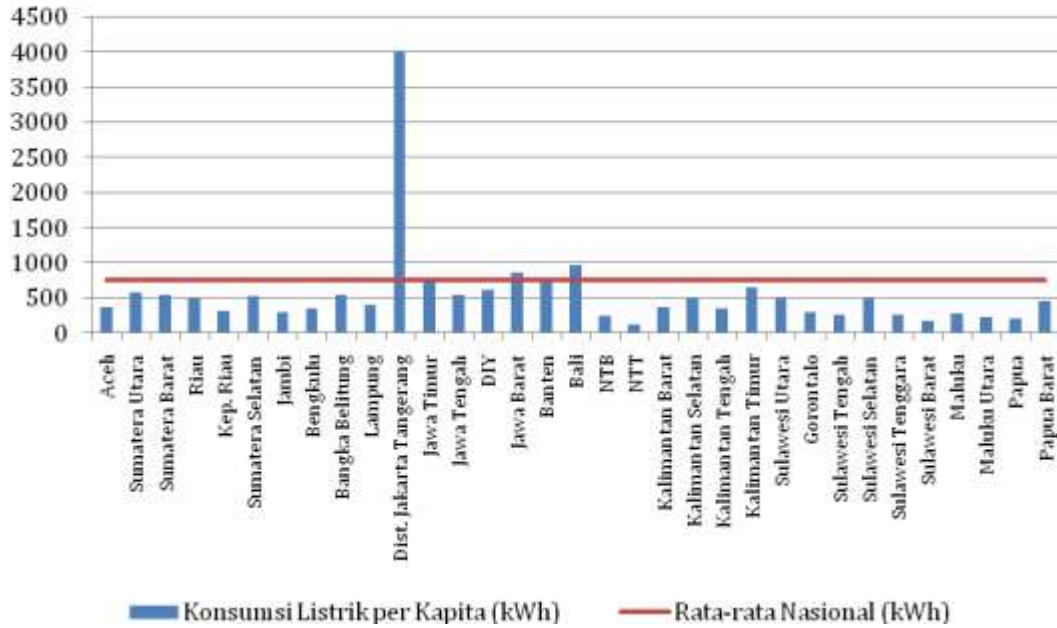
**Tabel 7**  
**Panjang Jalan Nasional Menurut Jenis Permukaan Tahun 2012**

PROVINSI	JENIS PERMUKAAN JALAN								Total	
	Aspal		Kerikil		Tanah		Lainnya			
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Jawa Barat	1787	81	237	11	166	8	9	0	2199	100
Jawa	11.081	73	896	6	625	4	2.688	17	15.270	100
INDONESIA	42.284	79	5018	9	3504	7	2836	5	53.642	100

Sumber: BPS, 2012

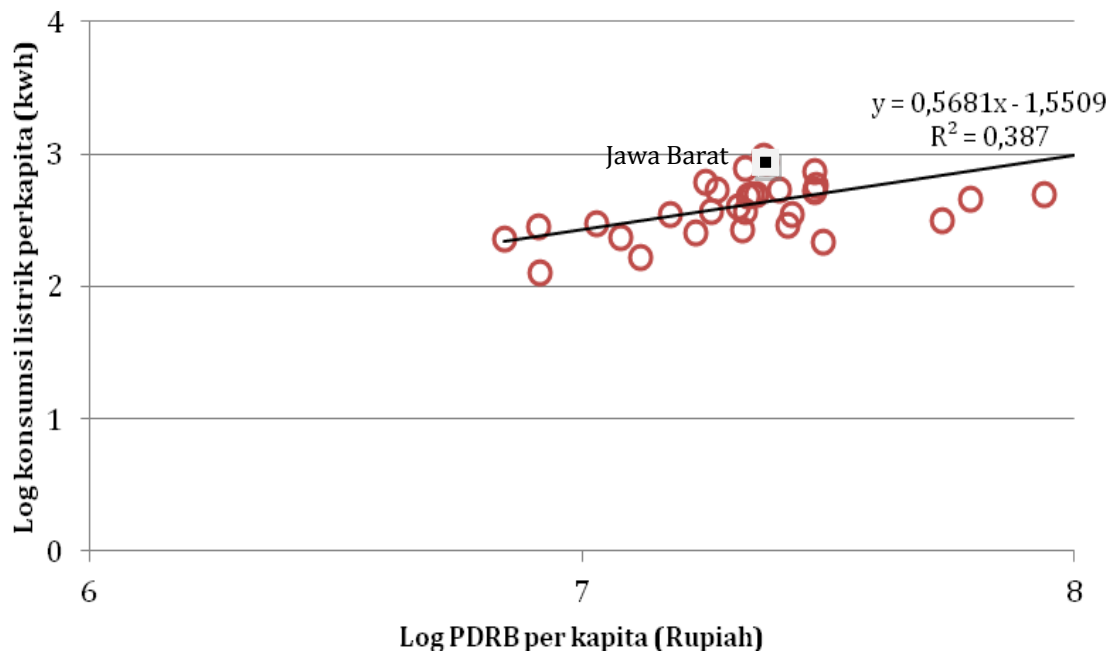
Infrastruktur lain yang juga sangat penting bagi perekonomian wilayah adalah kelistrikan. Dengan membandingkan kondisi di 33 provinsi, konsumsi listrik perkapita di Jawa Barat berada di atas rata-rata nasional dan merupakan yang tertinggi kedua di wilayah Jawa setelah DKI Jakarta (Gambar 12).

**Gambar 12**  
Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2013



Sumber: Statistik PLN, 2013

**Gambar 13**  
Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2013



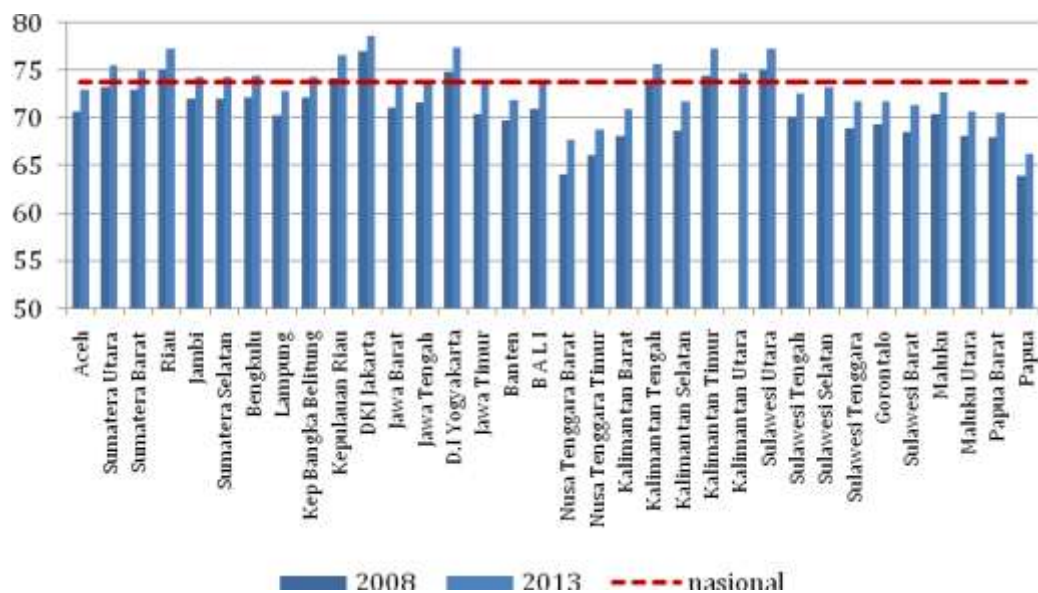
Sumber: BPS (2013), Statistik PLN (2013) - diolah

Dengan menggunakan data 33 provinsi, terlihat hubungan yang positif antara PDRB per kapita dengan tingkat konsumsi listrik (Gambar 13). Provinsi yang memiliki posisi di bawah kurva linier mengalami defisiensi infrastruktur listrik. Posisi Jawa Barat berada di atas kurva linier, menunjukkan Jawa Barat tidak mengalami defisiensi infrastruktur listrik. Dengan demikian, kelistrikan tidak menjadi masalah bagi Jawa Barat.

## 5. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif meningkat tahun 2013 dibandingkan tahun 2008 namun masih berada di bawah IPM nasional sebesar 73,81 (Gambar 14).

**Gambar 14**  
Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2013



Sumber: BPS, 2013

IPM Jawa Barat menduduki peringkat ke-17 secara nasional pada tahun 2013 dengan nilai IPM sebesar 73,58. Pada indikator usia harapan hidup, terjadi perbaikan dari angka 67,8 tahun pada tahun 2008 menjadi 68,8 tahun pada tahun 2013. Rata-rata lama sekolah di Jawa Barat meningkat dari 7,5 tahun pada 2008 menjadi 8,1 tahun pada 2013. Sementara itu pada indikator angka melek huruf, capaian di Jawa Barat pada tahun 2008 dan 2013 meningkat dari 95,5 menjadi 96,8 persen, lebih tinggi dari angka nasional sebesar 94,14.

Apabila dilihat dari struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, proporsi angkatan kerja dengan ijazah minimal SMA meningkat dari 56,10 persen pada tahun 2008 menjadi 88,01 persen pada tahun 2014 (Tabel 8). Hal ini menunjukkan angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat relatif berkualitas.

**Tabel 8**  
**Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan**

No.	Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	2008	2014 (Feb)	Perubahan
1	≤ SD	9.935.220	9.868.700	(66.520)
2	SMTP	3.410.567	4.060.580	650.013
3	SMTA Umum	4.040.436	5.587.309	1.546.873
5	Diploma I/II/III/Akademi	565.284	508.670	(56.614)
6	Universitas	792.472	1.262.115	469.643
	<b>total</b>	<b>18.743.979</b>	<b>21.287.374</b>	<b>2.543.395</b>

Sumber: BPS, 2014

## 6. Rendahnya Mobilitas Tabungan Masyarakat

Tabungan yang dihimpun bank umum dan BPR lebih tinggi dibandingkan pinjaman yang diberikan. Kondisi ini menunjukkan banyaknya dana perbankan di daerah yang bisa dikonversi menjadi investasi bagi kegiatan produktif melalui fungsi intermediasi perbankan. Rasio pinjaman terhadap simpanan di Jawa Barat yang berada di atas rata-rata nasional menunjukkan kegiatan investasi di Provinsi Jawa Barat ditentukan oleh simpanan masyarakat (Tabel 9).

**Tabel 9**  
**Rasio Simpanan dan Pinjaman di Bank Umum dan BPR Tahun 2013**

Wilayah	Posisi Simpanan di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Posisi Pinjaman di bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan	Rasio PMTB terhadap Simpanan
Jawa Barat	311.253	424.917	1.36	0.62
Jawa Bali	2.785.534	2.357.461	0.84	0.42
Nasional	3.575.891	3.322.683	0.92	0.47

Sumber: BPS, 2013

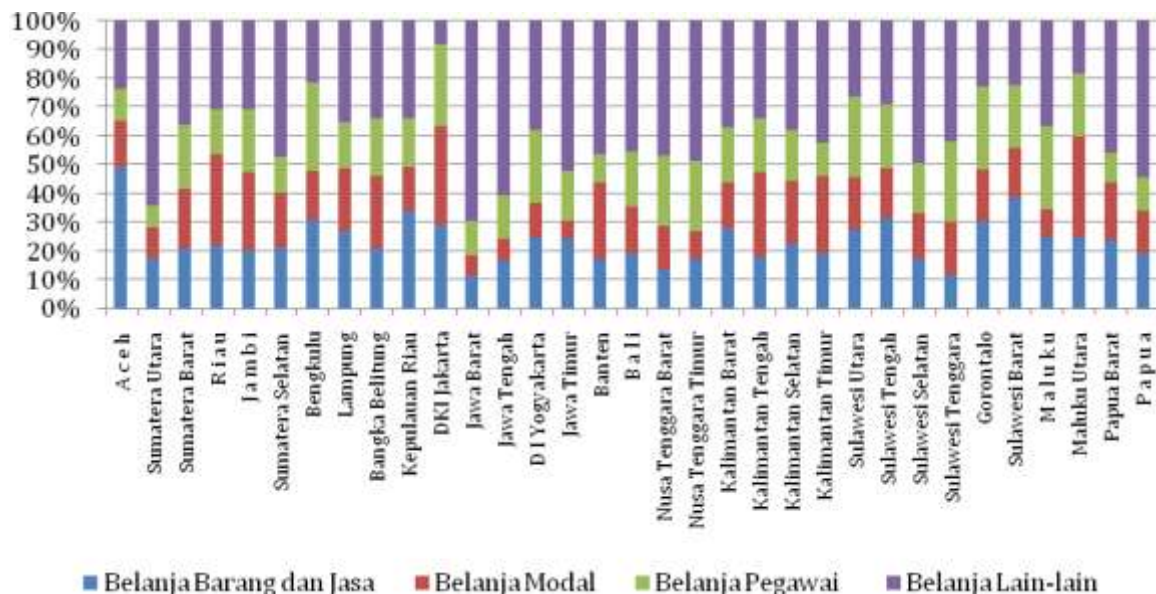
Rasio PMTB < 1, menunjukkan potensi simpanan masyarakat masih memenuhi untuk pembiayaan investasi di daerah. Hal ini mengindikasikan sebagian besar pinjaman masyarakat yang dilakukan di Jawa Barat bersifat konsumtif. Dalam jangka panjang terbatasnya sumber dana pinjaman ini akan berisiko meningkatkan harga modal (*cost of fund*) di daerah. Dengan kondisi tingginya permintaan kredit, bank-bank umum mungkin menerapkan tingkat bunga kredit yang sama antardaerah, namun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan lembaga-lembaga keuangan non bank lainnya tentu akan meningkatkan imbal hasil (bunga) pinjaman. Kenaikan bunga pinjaman akan memberatkan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Tantangan yang harus diatasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa

Barat adalah mengembangkan kerjasama dengan perbankan dalam penjaminan kredit dan mobilisasi tabungan masyarakat.

## 7. Kualitas Belanja Daerah

Berdasarkan data total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2013, porsi belanja modal dalam total belanja APBD di Jawa Barat hanya mencapai 6,8 persen, sedangkan belanja pegawai sebesar 12 persen (Gambar 15) Ke depan perlu terus didorong komposisi belanja pemerintah daerah ini yang lebih mengarah pada belanja modal. Belanja modal memiliki dampak langsung yang relatif besar kepada perekonomian. Meskipun secara umum porsi investasi pemerintah lebih kecil dibandingkan investasi swasta, namun perannya tidak tergantikan dalam suatu perekonomian. Pembangunan prasarana publik seperti jalan, saluran irigasi, dan jaringan listrik mutlak memerlukan peran pemerintah. Peran investasi pemerintah ini dirasa semakin penting di daerah-daerah yang level investasi swastanya relatif rendah. Investasi pemerintah dalam konteks ini adalah sebagai perintis dan pembuka jalan bagi masuknya investasi swasta.

**Gambar 15**  
**Komposisi Belanja Pemerintah Daerah, 2013**



Sumber: BPS, 2013

## D. Prospek Pembangunan Tahun 2015

Prospek pertumbuhan daerah cukup baik bila dilihat dari beberapa modal pembangunan yang dimiliki, di antaranya kesenjangan internal yang relatif rendah dan prospek integrasi ekonomi daerah ke dalam pengembangan ekonomi Jawa. Indeks Gini, yang mengukur tingkat kesenjangan konsumsi masyarakat di Provinsi Jawa Barat, selama

periode 2008-2013 mengalami peningkatan dari angka 0,35 menjadi 0,41. Sementara itu pada saat yang sama Indeks Gini tingkat nasional juga meningkat dari 0,35 menjadi 0,40. Tingkat kesenjangan yang rendah akan menciptakan suasana yang kondusif bagi upaya penurunan kemiskinan, peningkatan kerukunan sosial, dan penciptaan stabilitas politik dan keamanan. Realisasi percepatan pengembangan ekonomi Jawa diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Manfaat dari proyek-proyek infrastruktur utama di kota-kota pusat pertumbuhan diperkirakan tak hanya memberi manfaat kota bersangkutan tetapi juga wilayah sekitarnya

Berdasarkan kinerja pembangunan selama ini dan modal pembangunan yang dimiliki, prospek pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2015 dalam mendukung pencapaian target utama RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

- Sasaran pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 5,5 – 7,7 persen dapat tercapai. Hal ini didukung oleh membaiknya investasi dan peningkatan kinerja sektor-sektor perekonomian. Kinerja ekspor dan sektor industri pengolahan di tahun 2015 akan semakin meningkat seiring dengan membaiknya perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat turut didukung oleh ekspor manufaktur yang terus meningkat.
- Upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Barat terus dilakukan agar sesuai dengan Buku III RPJMN 2015-2019. Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 8,9 – 6,3 persen, sedangkan pada tahun 2013 tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat sebesar 9,52 persen. Selama kurun waktu 2014-2019 Provinsi Jawa Barat harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 3,22 poin persentase atau 0,54 poin persentase per tahun
- Prospek pencapaian sasaran-sasaran utama pembangunan Provinsi Jawa Barat akan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan baik internal daerah Jawa Barat maupun lingkungan eksternal. Dampak krisis di Eropa dan pelambatan arus perdagangan global merupakan ancaman eksternal yang bisa mengganggu kinerja perekonomian daerah.

## **E. Penutup**

### **1. Isu Strategis Daerah**

Dari hasil analisis dan informasi yang tersedia, dan memperhatikan kriteria isu strategis: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki, maka isu-isu strategis Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan produktivitas pertanian;
- b. Pengembangan industri unggulan daerah;
- c. Peningkatan investasi di daerah;
- d. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;



- f. Mobilisasi tabungan masyarakat dan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha;
- g. Peningkatan kualitas belanja modal pemerintah daerah.

## **2. Rekomendasi Kebijakan**

Penanganan isu-isu startegis daerah diperkirakan akan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu ditempuh dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;
- b. Pengendalian konversi lahan pertanian;
- c. Pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses faktor produksi (pupuk, benih, pestisida) termasuk peningkatan jaringan irigasi, penyuluhan dan promosi *brand/citra* komoditas unggulan daerah;
- d. Peningkatan jumlah produk industri pengolahan berkualitas ekspor;
- e. Peningkatan kemudahan perijinan usaha;
- f. Perbaikan kualitas jaringan jalan;
- g. Peningkatan akses pendidikan khususnya pendidikan menengah (umum dan kejuruan) dan kesehatan;
- h. Peningkatan porsi belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah;

Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah.

